



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

SKRIPSI

OLEH:

ARIF KURNIA RAHMAN
11675102079



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINSTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

ARIF KURNIA RAHMAN
11675102079



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINSTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

: ARIF KURNIA RAHMAN

: 11675102079

FAKULTAS/JURUSAN

: Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH PADA KANTOR BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos., M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS
Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag.MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ARIF KURNIA RAHMAN
 NIM : 11675102079
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK
 DAERAH PADA KANTOR BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH PROVINSI RIAU

**DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING**

Afrizal, S.Sos., M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS
Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**KETUA JURUSAN
Ilmu Administrasi Negara**

Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag.,MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIF KURNIA RAHMAN
 NIM : 11675102079
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi
 Negara
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK
 DAERAH PADA KANTOR BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH PROVINSI RIAU
 HARI/TANGGAL UJIAN : Selasa, 24 Juni 2020

**PANITIA PENGUJI
 KETUA PENGUJI**

Dr. Jhon Afrizal, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

PENGUJI II

Drs. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIF KURNIA RAHMAN
 NIM : 11675102079
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi
 Negara
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK
 DAERAH PADA KANTOR BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH PROVINSI RIAU
 HARI/TANGGAL UJIAN : Selasa, 24 Juni 2020

**PANITIA PENGUJI
 KETUA PENGUJI**

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I

Drs. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

PENGUJI II

Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Ooleh:

ARIF KURNIA RAHMAN

NIM. 11675102079

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan barang milik daerah serta mengetahui hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik secara administrasi akan tetapi secara implementasi belum sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara dengan pejabat dan pegawai yang ada pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan jalan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI RIAU”**.

Dalam masa penulisan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih banyak untuk kakak tercinta Arini Hasanah yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Drs.H. Muh. Said HM.M.Ag.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si. selaku ketua jurusan Administrasi Negara dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M. Kp selaku Sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Irdayanti, SIP., MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
7. Bapak Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Staff dan Pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Bapak Syahril Abdi, AP., M.Si, Bapak Herman, SH., M.Si, Bapak Drs. Muhammad Arifin, M.Si, Bapak Tengku Riga Brimayuda, S.Stp., M.Si, yang telah banyak membantu penulis.
9. Sahabat-sahabat, kakak tercinta Arif Hidayat, Fikri Hamdi, Riki Prayoga, Muhd. Zainal Asikin, Putri Widi Astuti, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalau memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Skripsi Yola Elvira, Mira Novrianti, untuk teman-teman kelas Administrasi Negara A angkatan 2016, serta teman-teman KKN Desa Pantai Raja 2019 yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umunya kepada pembaca.

Pekanbaru, April 2020

Arif Kurnia Rahman

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah	11
2.2 Aset Daerah.....	13
2.3 Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	19
2.4 Manajemen Aset Daerah.....	34
2.5 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah	36
2.6 Penelitian Terdahulu	39
2.7 Definisi Konsep	40
2.8 Konsep Operasional.....	41
2.9 Kerangka Berpikir	44
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3 Subjek Penelitian	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Informasi Penelitian.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data	49
--------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	51
4.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	52
4.3 Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	53

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Infomen	76
5.2 Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau	79

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	116
6.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Riau	5
Tabel 1.2 : Jumlah dan Kondisi Aset Daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	6
Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian Pengelolaan Aset Daerah atau Barang Milik Daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	42
Tabel 5.1 Distribusi Infomen Berdasarkan Umur Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	77
Tabel 5.2 Distribusi Informen Berdasarkan Lama Bekerja Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	78
Tabel 5.3 Distribusi Informen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	79
Tabel 5.4 Rencana Kebutuahn Barang Unit (RKBU) Tahun 2018-2019 Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Riau	83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4 Badan Struktur Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau	76
Gambar 5.2 Silus Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019	87
Tabel 5.6 Penetapan Status Penggunaan Barang Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	90
Tabel 5.7 Objek Barang Milik Daerah yang di Sewakan dalam Pemanfaatan barang Milik Daerah	93
Tabel 5.8 Pengamanan Secara Hukum Terhadap KIBA (Tanah) dan KIB C (Gedung Kantor) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	95
Tabel 5.9 Pengamanan Secara Hukum KIB B (Peralatan dan Mesin) untuk kategori Alat-Alat Transportasi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	96
Tabel 5.10 Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Alat-alat Transportasi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	98
Tabel 5.11 Pelaksanaan Pembinaa, Pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	110



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing- masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelolah, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan Sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara persersial, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah diuangkan dalam Peraturan Pemerintrah No. 27 Tahun 2014 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Mentri dalam Negri No 19 Tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan, perlunya penyesuain terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

Menurut peraturan gubernur provinsi riau no. 92 tahun 2016 tantang tugas dan fungsi BPKAD memiliki tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi dari BPKAD sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang perbendaharan dan kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sekretariat, bidang angrang daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat, bidang anggaran daerah, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efisien, maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah provinsi Riau nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Peraturan daerah provinsi Riau Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Daerah, bahwasannya Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: Pejabat pengelola barang milik daerah, Perencanaan kebutuhan dan anggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pengelolaan barang milik daerah pada pengelolaan BLUD, Barang Milik Daerah Berupa Negara, dan Ganti Rugi Sanksi.

Proses tersebut merupakan Siklus Logistik yang lebih rinci pengelolaan barang milik daerah yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan..

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Aset tidak bergerak (*Real property*) yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan dan serta bangunan bersejarah.
2. Aset bergerak (*Personal property*) yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan.

Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai *stake-holder*, aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah.oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam mengelolah aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang- undang yang berlaku.

Tabel 1.1: Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Riau

No	Nama Aset Daerah	Keterangan
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	Alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat ukur, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan.
3.	Gedung dan Bangunan	Terali Kantor
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, dan Jaringan
5.	Aset Tetap Lainnya	Buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, dan hewan ternak serta tumbuhan.
6.	Konstruksi dan Pengkerjaan	Aset daerah yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh

Sumber :Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019

Tabel diatas membuktikan begitu banyak aset daerah yang dimiliki oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, yaitu mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Ini semua harus dikelola dengan baik agar menjadi nilai tambah dan bermanfaat kemajuan kantor tersebut.



Tabel 1.2 : Jumlah dan Kondisi Aset Bergerak di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Nama Aset Daerah	Tahun pembelian	Harga pembelian	Jumlah Aset	Status		Nilai Aset
				Baik	rusak	
Peralatan dan mesin						
Minibus	2014		25	22	3	4.575.000.000.00
Sepeda motor	2015		6	6		219.000.000.00
Alat penghancur kertas	2015		3	3		11.448.000.00
Plang nama	2016		19	19		56.325.500.00
Proyektor	2017		6	5	1	26.750.000.00
Ac	2016		26	24	2	96.840.000.00
Komputer	2018		52	46	6	607.200.000.00
Laptop	2018		15	12	3	102.000.000.00
Mesin foto copy	2017		6	6		119.500.000.00

Tabel 1.3 : Jumlah dan Kondisi Aset Tidak Bergerak di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Nama Aset Daerah	Tahun pembelian	Harga pembelian	Jumlah Aset	Status		Nilai Aset
				Baik	rusak	
Tanah						
Tanah bangunan kantor pemerintah	1975	-	1	1	-	5.450.000.000.00
Tanah bangunan rumah negara	1961	-	1	1	-	2.354.000.000.00
Gedung dan bangunan						
Bangunan gedung tempat kerja	1977			5		2.641.705.819.00
Bangunan gedung tempat tinggal	2011		9	-	-	2.289.095.629
Jalan irigasi dan bangunan						
Instalasi pembangkit listrik	2017		1	1		104.660.901,75
Jaringan listrik	2007		5	5		273.903.499.23
Jaringan telfon	2006		2	2		74.301.896.74
Jumlah Aset Keseluruhan						18.998.065.425.00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari Fenomena diatas peneliti melihat gejala- gejala yang berhubungan dengan Pengelolaan Aset Daerah antara lain :

1. Dalam pengelolaan barang milik daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum pernah adanya penghapusan sehingga sulit dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Kurangnya personil dalam mengelola aset daerah yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan
3. Pegawai di kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi riau sebagian besar belum mengetahui sepenuhnya tentang permendagri no 19 tahun 2016 sehingga walaupun secara administrasi sudah sesuai dengan permendagri no 19 tahun 2016 akan tetapi secara pelaksanaan belum sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang di atas yang diuraikan serta gejala- gejala yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)DI PROVINSI RIAU**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau
2. Untuk Mengetahui Kendala atau hambatan dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang diuraikan maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan ilmu sosial terutama ilmu administrasi Negara
2. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir serta melihat sejauh mana Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau..’



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulisan akan membagi menjadi enam Bab bahasan, dimana masing- masing Bab dibagi lagi menjadi sub-bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori , konsep, definisi konsep, konsep operasional/ variabel penelitian , hipotesis

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data,s populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur, mengurus, megendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Kansil (2002:149) tujuan pemberian otonomi kepada daerah ialah berorientasi kepada pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah berkewajiban dari pada hak, hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya dengan sungguh- sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita- cita bangsa.

Daerah diberikan keluasaan untuk menangani urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing- masing daerah. Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan sebagaimana

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negeri RI.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkat peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Seiring dilaksanakan otonomi daerah, tidak hanya terjadi desentralisasi dalam hal pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi lebih luas desentralisasi juga telah terjadi dalam pengelolaan barang milik daerah. Dimana pada era sebelumnya pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang milik daerah terpusat pada bagian perlengkapan saja, tetapi saat ini pengelolaan barang tersebut sampai ke level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jadi, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut. Otonomi daerah tidak hanya sebatas penyerahan kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan tetapi juga penyerahan pengelolaan barang milik daerah hingga level Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.2 Aset Daerah

2.2.1 Pengertian Aset Daerah

Menurut Mahmudi (2010:146) Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Aset adalah barang, dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak terwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2004 yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah. dengan mengelolah aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan rugi. Keseluruhan kegiatan merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam manajemen aset daerah. dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintahan daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang- undang no 1 tahun 2004 yang dimaksud aset/ barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelolah aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembiayaan di daerah. dalam mengelolah aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek- aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah.dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan Himpunan Peraturan-peraturan Inventarisasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Badan Akuntansi Keuangan Negara 1995 pasal 2 disebut barang- barang milik Negara/ daerah yang termasuk jenis barang- barang yang tidak bergerak antara lain:

1. Tanah- tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga dan tanah- tanah yang belum dipergunakan , jalan- jalan (tidak termasuk jalan daerah) jalan kereta api, jembatan, waduk dan lain sebagainya.
2. Gedung- gedung yang digunakan untuk kantor, pabrik- pabrik, bengkel,sekolah, rumah sakit, studio, dan gedung lain sebagainya.
3. Gedung- gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti rumah- rumah tempat tinggal, tempat istirahat dan gedung lain sebagainya.

Berdasarkan pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Baeang Milik Negara/ Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas bantuan APBN dan APBD, selanjutnya Barang yang berasal dari perolehan lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/ kontrak diperoleh dari ketentuan undang- undang atau barang yang diperoleh berdasarkan peraturan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.2.2 Karakteristik Aset Daerah

Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efesien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

Aset daerah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang disusun dalam PSAP No. 07 berikut adalah di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Golongan tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset daerah ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap untuk dipakai.

2. Golongan peralatan dan mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Golongan gedung dan bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Golongan jalan, irigasi, dan jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Golongan aset tetap lainnya;

Aset daerah lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset daerah yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Golongan konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset daerah yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh.

Aset Daerah Memiliki Karakteristik Menurut Giri (2012:35) adalah sebagai berikut:

3. Memiliki wujud fisik
4. Diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberikan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang, dan merupakan subjek depresiasi.

Sedangkan karakteristik Aset daerah menurut IAI,PSKAK (2017:162) adalah sebagai berikut:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas.
2. Biaya perolehan Aset daerah dapat diukur secara andal.

Dengan demikian, karakteristik aset daerah adalah aset daerah yang tersedia dalam bentuk fisik yang mempunyai masa manfaat jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasional agar entitas tersebut dapat mencapai tujuannya.

5.2.3 Inventarisasi Asal Usul Aset Daerah

Pada proses penatausahaan, pencatatan,dan pengadminstrasian, karekteristik aset daerah yang disebutkan diatas terlebih dahulu dilakukan inventarisasi asal usul aset atau barang milik daerah oleh para pejabat pengguna barang atau pengelolaa barang serta pegawai yang ditugasi untuk mengurus aset atau barang milik daerah. asal usul aset setidakya terdiri dari lima sumber antara lain sebagai berikut:

1. Aset yang berasal dari pengadaan.
2. Aset yang berasal dari penyerahan para pengembang perumahan dan permukiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aset yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota.
4. Aset yang berasal dari perubahan desa menjadi kelurahan.
5. Aset yang berasal dari pihak luar negeri.

2.3 Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah

2.3.1 Pengertian Pengelolaan aset

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dengan adanya perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah. dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat.

Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu- waktu. Dengan sistem informasi data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih baik sehingga dapat memberikan informasi yang lebih handal pada pemakai informasi dalam laporan keuangan. Selain faktor- faktor pengelolaan aset tanah dan bangunan dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori Undang- undang, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek kebijakan pimpinan dan aspek strategis. Dengan adanya kedua aspek tersebut akan dapat mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintahan daerah.

Menurut Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Daerah, bahwasannya Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : Pejabat Pengelolaan barang milik daerah, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD, barang milik daerah berupa rumah Negara, dan ganti rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Azas- azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus di kelolah dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas- azas (Pengabeau, 2002:36) sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing- masing.
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan.
3. Azas tansparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus tansparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang banr.
4. Azas efesien, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah (T. Hani Handoko, 2008:48).

2.3.3 Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Pada dasarnya pengelolaan aset yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai azas atau prinsip yang sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan dirasakan manfaatnya bagi kehidupan dan kemajuan rakyat. Oleh karena itu agar pengelolaan atau manajemen pengelolaan kekayaan daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan, haruslah diterapkan prinsip- prinsip manajemen modern yang intinya adalah adanya perencanaan yang matang pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Perencanaan yang matang memerlukan syarat adanya kemampuan dan kecermatan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dibutuhkan pada saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah maka idenya harus ada validasi data, pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemampuan untuk mengukur apa dan berapa potensi kekayaan yang dimiliki dan bagaimana perencanaan penggunaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang matang, masyarakat akan terhindar dari pemborosan, dan tidak merugikan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan yang tepat, mensyaratkan adanya proses penyelenggaraan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah diterapkan. Hal ini dapat dicapai jika didukung oleh adanya aturan yang jelas, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara para pihak yang terkait didukung pula oleh profesionalisme bagi para pelaksananya. Pengamanan terhadap kekayaan daerah yang harus dilakukan secara memadai, baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern). Hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlu dilakukannya perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal itu disebabkan serangkaian biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi modal.

Prinsip yang ketiga adalah pengawasan yang ketat. Artinya adalah bukan model pengawasan yang membelenggu dan mengakibatkan kesulitan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Juga bukan pengawasan yang cenderung mencari – cari kesalahan terhadap para pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan yang ketat dalam manajemen modern adalah konsistensi didalam menerapkan prinsip, aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum- oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

2.3.4 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. dibawah ini dapat dilihat siklus pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan barang milik daerah, yang mana pejabat yang memiliki wewenang tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala daerah selaku penguasa aset/ barang milik daerah.
- b. Sekretaris daerah selaku pengelolaan barang milik daerah.
- c. Pembantu pengelola aset/ barang milik daerah.
- d. Kepala SKPD selaku pengguna aset/ barang milik daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sesuai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia.

Perencanaan dan penentuan kebutuhan dan penggaran sangat penting guna menunjang kelancaran dan keberlanjutan menyiapkan kebutuhan serta perlengkapan dalam rangka menggemban tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. perencanaan yang baik, efesien dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran anggaran Belanja Pemerintah Daerah. dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai besaran jumlah pegawai dalam suatu organisasi.
2. Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga memerlukan penggantian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang.
4. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efektif dan efisien.
5. Pertimbangan ekonomi.

Fungsi perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan atau ketersediaan keuangan daerah. perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penggaran didasarkan atas beban dan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal barang apa yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, bilamana dibutuhkan, berapa biaya, siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan, alasan-alasan kebutuhan, dan cara pengadaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembantu pengelola melaksanakan koordinasi, menyiapkan atau menyusun dan menghimpun rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga, disusun oleh panitia atau konsultan.

3. Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan atau pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar manukar, guna susun).

Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan atau pemborongan pekerjaan, membuat sendiri

4. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelolah dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan satuan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan dapat dioperasikan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain dan dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

5. Pemanfaatan

Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak memberikan anggaran pendapatan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaannya agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat ditambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

7. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. pelaksanaan penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset.

8. Pemindahtanganan

Pemindahtangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

9. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan Barang Milik daerah. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tidak dapat digunakan;
- b. Tidak dapat dimanfaatkan;
- c. Tidak dapat dipindahtangankan;
- d. Alasan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan pemusnahan dilakukan dengan cara :
 - 1) Dibakar;
 - 2) Dihancurkan;
 - 3) Ditimbun;
 - 4) Ditenggelamkan;
 - 5) Cara lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya.

11. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap satuan kerja perangkat daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang milik pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan pengelolaan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah.

12. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan . Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Barang milik daerah Berupa Rumah Negara

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Barang milik daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah berada di bawah pengurusan atau penguasaan kementerian atau lembaga Negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta unit- unit dalam lingkungan nya. Barang milik daerah berupa tanah harus ada sertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia. Barang daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Barang kepemilikan milik daerah selain tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang.

14. Ganti rugi dan Sanksi

Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpanan atau pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi (TGR) karena perbuatannya merugikan daerah. setiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar tetap terjaga dengan baik.

2.3.5 Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam pengelolaan kebijakan pengelolaan Aset daerah, antara lain:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikat kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan, kegiatan tukar menukar, dan hibah.
2. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah
3. Pengamanan aset daerah
4. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset daerah) meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupapotensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlunya sistem informasi manajemen daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan perdagangan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (*miss management*), kehilangan, dan tidak termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan DPRD sangat penting karena harus menghasilkan *feedback* pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah.

4. Keterlibatan jasa penilai

Pertambahan aset daerah dari tahun ketahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen, peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

- a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah
- b. Memberikan informasi mengenai status hukum harta

- c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud atau tidak berwujud
- d. Analisis inventarisasi dan set- up inventarisasi/ pembiayaan
- e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manajemen Aset Daerah

Jika berbicara manajemen aset secara umum, Kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya, sampai penghapusan barang tersebut (As'ad, 2001:58). Manajemen aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Manajemen aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelolah penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap aset tetap dan aset bergerak yang disesuaikan dengan nilai yang wajar. Menurut A. Gima Sugiana (2013) mengemukakan bahwa manajemen aset adalah ilmu atau seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang, yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang tersebut (As'ad,2002:58) adalah sebagai berikut: a) perencanaan (*planning*) Meluputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgeting*).b)Pengadaan (*Procurement*) meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya. c) Penyimpanan dan penyaluran (*storage and distribution*) d) Pengendalian (*controlling*), e) Pemeliharaan (*maintenance*), f) Pengamanan (*safety*), g) Pemanfaatan penggunaan (*utilities*), h) Penghapusan (*disposal*) i) Inventarisasi (*Inventarization*)

Sedangkan kalau berpedoman pada landasan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan pengangan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Pengertian mengenai Barang Milik Daerah yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 tahun 2016sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Barang Milik Daerah meliputi :
 - Barang yang dibeli atau peroleh atas beban APBD
 - Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
- Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya
 - Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/ kontrak
 - Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang- undang
 - Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Menurut Mahmudi (2009:151) Pengelolaan Barang Milik daerah Meliputi Proses Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dimana pada setiap item pengelolaan aset daerah diatas telah jelas bentuk atau siklus pengelolaan aset daerah.

2. Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah

Kekayaan publik merupakan kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan Abu Yusuf bahwa uang publik adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban, maka harus digunakan sebaik- baiknya untuk untuk kemaslahatan rakyat. Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta islam kadang tidak berbeda menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para penulis modern dalam harta umum. Makna maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdikan kepada Allah SWT. Menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat yang dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat konkret. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kedua, dilindungi undang-undang.

Harta (kekayaan atau hak milik) pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu: materi dan non materi. Contoh yang berwujud materi adalah uang, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang berwujud non materi adalah deposito, HAKI (hak atas kekayaan intelektual), saham, dan lain sebagainya. Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Diantar bentuk klasifikasi tersebut adalah harta tetap atau diam dan harta bergerak. Harta tetap atau diam adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Harta bergerak adalah harta yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.

Ada 3 point penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam islam (sesuai Al-Qur'an dan Hadits) yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Larangan mencampur-adukan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Fajr ayat 19



Artinya: *“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang bathil”*

2. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan QS.Al-Fajr ayat 20



Artinya: *“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”*

3. Rasulullah SAW bersabda yang artinya *”Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang merasa cukup.”* (HR.Bukhari no.6446 dan Muslim no.1051).

Menurut Umar Anshary Sitanggal (2008:118) pandangan islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah SWT, kepemilikan oleh manusia bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelolah dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuanNya.

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

“Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya atas empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dimana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:
 - Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
 - Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Ali Imran:14). Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri.
 - Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkannya dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak (Al-Anfal:28)

2.6 Penelitian Tedahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Hasil Penelitian	Peneliti	Tahun Peneliti
1.	Dilatar belakangi ketidaktertiban dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/ barang daerah yang meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan, hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/ dikelolanya, sehingga aset- aset yang dikulolah pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.	Rasyidah (2012) dengan judul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintahan Kota Padang”	2012
2.	Berdasarkan Pemendagri no 17 tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan tata usahan dan akuntansi aset tetap pada DPKA kota padang belum efektif dilaksanakan, dikarenakan masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu	Fairoza Hilma KH (2013) dengan judul “Analisis Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang “.	2013

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Hasil Penelitian	Peneliti	Tahun Peneliti
	keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia.		
3.	Manajemen aset daerah di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum optimal dalam rangka pengelolaan aset daerah di kabupaten tana toraja.	Hestria Nivia Yanti Siama (2013) “ Manajemen Aset Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja “	2013
4.	Dilatarbelakangi oleh belum terinfentarisnya aset daerah (barang milik daerah) dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kementerian atau lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan penerbitan aset daerah.	Fasiha (2010) UIN SUSKA RIAU “ Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti “	2010
5.	Dilatarbelakangi Belum terlaksananya secara maksimal pengelolaan aset daerah sesuai dengan siklus yang ada, seperti keterlambatan pelaporan pada tingkat pengguna barang.	Ikbar Ansrian Sumardi (2010) UIN Alaludin Makasar “ Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri No 19 tahun 2016”	2010

2.7 Defenisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan defenisi konsep. Konsep merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Menurut Iqbal Hasan (2004:12) konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa definisi konsep yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya:

- Otonomi daerah adalah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Aset Daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud.
- Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Manajemen aset daerah adalah suatu kegiatan manajemen dalam mengelola barang milik daerah berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/ barang milik daerah dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan pengelolaan aset daerah.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur-unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Maka faktor pendukung dalam pengelolaan aset daerah peraturan daerah Provinsi Riau No. 25 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. terdapat 15 siklus dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. Dimana variabel yang digunakan untuk Dalam penelitian ini peneliti membuat pengelolaan atas aset / barang milik daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2. Konsep Operasional Penelitian Pengelolaan Aset Daerah atau Barang Milik Daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pejabat pengelola 1. barang milik daerah	1. Gubernur
		2. Sekretaris Daerah
		3. Kepala Perangkat Daerah
	2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	1. memperhatikan data barang dalam
		2. Menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah.
		3. menghimpun usul rencana kebutuhan barang
	3. Pengadaan	1. Pembelian, pembelian, membuat sendiri dan swakelola.
	4. Penggunaan	1. penggunaan barang bergerak
		2. penggunaan barang tidak bergerak
	5. Pemanfaatan	1. Sewa
		2. Pinjam pakai
		3. Kerjasama pemanfaatan
		4. Bangun guna serah dan bangun serah guna.
	6. Pengamanan dan	1. Pengamanan dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub Indikator
	pemeliharaan	kepemilikan sertifikat tanah,BPKB, dan dokumen lainnya.
		2. Pengamanan fisik seperti pemagaran, tanda batas dan tanda kepemilikan.
		3. Pengamanan hukum.
	7. Penilaian	1. Penilaian barang milik daerah berupa tanah
		2.penilaian barang milik daerah berupa bangunan
	8. Pemindahtanganan	1. Penjualan
		2. Tukar menukar
		3. Hibah
		4. Penyertaan modal pemerintah daerah.
	9. Penghapusan	1. Penghapusan dari daftar pengguna/ kuasa pengguna.
		2. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.
	10. Pemusnahan	1. Dibakar
		2. Dihancurkan
		3. Ditimbun
		4. ditenggelamkan
	11. Penatausahaan	1. Pembukuan
		2. Inventarisasi
		3. Pelaporan
	12. Pengawasan dan pengendalian	1. Melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan dan pengamanan barang milik daerah dibawah peguasaannya
	13. Barang milik daerah berupa rumah negara	1. Rumah Negara golongan I
		2. Rumah Negara golongan II
		3. Rumah Negara golongan III
	14. Ganti rugi dan sanksi	1. Setiap kerugian daerah, diselesaikan dengan ganti rugi.
		2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 Provinsi Riau Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Kerangka Berpikir

Berikut gambar dari variabel penelitian Pengelolaan Aset/Barang Milik

Daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



Peraturan Daerah Provnsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Daerah

- a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
- b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- c. Pengadaan
- d. Penggunaan
- e. Pemanfaatan
- f. Pengamanan dan pemeliharaan
- g. Penilaian
- h. Pemindahtanganan
- i. Penghapusan
- j. Pemusnahan
- k. Penatausahaan
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- m. Barang milik daerah berupa rumah Negara
- n. Ganti rugi dan sanksi



Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif dan Efesien

Sumber: Data olahan Peneliti, 2019



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa kantor BPKAD ini memiliki peran besar dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan Kinerja Pegawai BPKAD dalam pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah di Provinsi Riau. Adapun Waktu Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:

1. data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam hal ini kepada Kepala BPKAD dan Kepala di setiap bagian dan kasubag di setiap bagian di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menelaah sumber- sumber tertentu seperti dokumen- dokumen, literature bacaan, karya tulis, peraturan perundang- perundangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu para pegawai di Badan Pengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta keterangan- keterangan dari yang bersangkutan.

3.3 Subjek Penelitian

subjek penelitian merupakan suatu yang penting dalam penelitian, subjek penelitian harus disiapkan sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian bisa berupa benda, hal ataupun orang lain. Berdasarkan pendapat diatas penulis menetapkan subjek penelitian adalah para pegawai di lingkungan Kantor BPKAD Provinsi Riau.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai nilai spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek- objek alam yang lain. Dengan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dan mengadakan pengamatan langsung ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa Tanya jawab yang dilakukan secara langsung antar penulis yaitu dengan kepala di setiap

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian yang ada di BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Riau dan para pegawai tentang kinerja dalam pengelolaan Manjemen aset daerah yang telah dilakukan setiap tahun.

3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data , yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis di kantorBadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Di setiap bagian- bagian yang ada di lingkungan Kantor BPKAD Provonsi Riau.

3.5 Informen Penelitian

Informen Penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti. Informan sering disebut sebagai responden karena hanya memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan peneliti.Informan penelitian memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.Informan penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Adapun Informen Penelitian Ini adalah dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala BPKAD	1 Orang
2.	Sekretaris BPKAD	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	1 Orang
4.	Kepala Akuntansi	1 Orang
5.	Kepala Bidang Anggaran	1 Orang
6.	Kepala Bidang Pembendaharan	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Pegawai	7 Orang
	Jumlah	13 Orang

Adapun penulis menjadikan beberapa pegawai untuk di jadikan sebagai informen sebagai berikut :

1. Mudah ditemui
2. Mengetahui tentang barang milik daerah
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

3. Teknik Analisi Data

3.6.1 Pengertian Analisis Data

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain dan dari pengertian diatas menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

3.6.2 Tujuan Analisis Data

ada 3 macam kegiatan dalam analisa data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan lapangan selama meneliti. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model data

Model data sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memperoleh pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Model yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan /Verifikasi Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proposisi- proposisi. Setelah semua data yang terkumpul berkenaan dengan pertimbangan pembentukan pengelolaan manajemen aset daerah yang efektif dan efisien serta dengan mengkaitkan dengan teori- teori yang ada, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMABARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah perangkat daerah Provinsi Riau terbentuk pada tahun 2015, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi Inspektorat, Bappeda, dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Riau resmi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun anggaran tahun 2015 bersamaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2015. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, pembatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan penggabungan dua bagian sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, yaitu bagian keuangan dan bagian perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sebagai komitmen nyata pemerintah Provinsi Riau, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat Daerah pada tahun 2019 menyusun Racangan awal Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2020.

4. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

4.2.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Visi disini adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam jangka menengah.

Berpedoman dari pengertian diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau memiliki visi adalah sebagai berikut “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau bersatu)”

4.2.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan menjabarkan kedalam misi yang lebih jelas. Karena misi adalah merupakan suatu cita-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cita atau tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui penerapan strategi yang dipilih suatu cita-cita atau tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui penerapan strategi yang dipilih dalam penentuan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan berdasarkan pengkajian dan pembahasan yang mendalam, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menentukan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

4. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berkendudukan dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Tugas dan Fungsi Pejabat beserta Perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau antara lain :

1. Kepala Badan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - Merencanakan program/kegiatan penganggaran Subbagian Perencanaan Program;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Perencanaan Program;
 - Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing – masing bidang;
 - Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja
 - Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur
 - Menyiapkan data dan usulan belanja hibah/bantuan sosial untuk bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 - Menyiapkan bahan dan rancangan pengembangan Sistem dan Informasi Keuangan Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- h. Mengelola sistem informasi keuangan daerah website, situs serta portal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - i. Mempersiapkan bahan – bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan serta rapat koordinasi teknis
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
 - e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
 - f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- k. Mela
- l. kukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan aset;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut ;**
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
 - Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
 - Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
 - Menyelenggarakan urusan kehumasan;
 - Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Anggaran Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Anggaran Daerah;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Melakukan verifikasi dan evaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 8. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut ;**
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
 - c. Menyelenggarakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - e. Menyiapkan dan menyusun pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - f. Menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - gg. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kepala Sub Bidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran mempunyai Fungsi dan Anggaran sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran;
 - c. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan anggaran Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Menghimpun dan mengolah data anggaran Kabupaten/Kota;
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**

- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan anggaran Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Menghimpun dan mengolah data anggaran Kabupaten/Kota;
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 18 **Kepala Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Belanja Daerah;

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan registrasi Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- e. Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. Melaksanakan pengadministrasian, laporan pemungutan dan pemotongan Piutang Pihak Ketiga;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Melaksanakan kordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan verifikasi terhadap laporan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban dan fungsional;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- k. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan rekening koran;
 - l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Belanja Daerah; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 13. Kepala Sub Bidang Pengelola Kas Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagi berikut**
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
 - c. Melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk;
 - d. Menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana dan Uang Persediaan;
 - e. Melakukan verifikasi administrasi dan rekomendasi usulan penunjukkan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
 - f. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - g. Mempersiapkan buku kas umum bendahara umum;

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan rekening Koran;
 - i. Melaksanakan analisa data penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
 - j. Melaksanakan pengelolaan kas anggaran;
 - k. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Pemerintah Provinsi
 - l. Menyusun, menyediakan, dan menyampaikan laporan posisi kas secara periodik;
 - m. Menyimpan uang dan surat berharga;
 - n. Melakukan proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang pembukaan dan penutupan rekening bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah, dan seluruh rekomendasi dan perikatan pendukung pelaksanaan perbendaharaan;
- 14. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**
- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

15. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
 - c. Menghimpun dan memvalidasi Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Dearah;
 - d. Melakukan Jurnal Konsolidasi;
 - e. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan Pemerintah Provinsi;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan prognosis Pemerintah Provinsi untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. Menganalisa jurnal memorial Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran;
 - i. Menyusun Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
 - j. Menyusun Neraca Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Neraca;
 - k. Mengkompilasi dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 1. **Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pada entitas akuntansi;
- Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Surat Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara;
- Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis enam bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Menghimpun dan menganalisa Kelengkapan Dokumen Jurnal Memorial;
- Menghimpun dan melakukan verifikasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Melakukan Rekonsiliasi Aset di Neraca dan Sistem Barang Milik Daerah;
- Menyusun Laporan Operasional Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Operasional;
- Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Arus Kas;
 - m. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - n. Menganalisa dan menyusun kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi;
 - o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 17. Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**
- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;**

a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Melaksanakan proses penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan pendataan/inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. Mengumpulkan, menyusun dan meneliti daftar rekapitulasi hasil pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Mengumpulkan, menyusun dan meneliti laporan daftar inventarisasi barang dan rekapitulasi daftar inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penetapan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola barang;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- f. Menyimpan seluruh dokumen asli kepemilikan barang milik daerah Pemerintah Provinsi;
- g. Mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. Melaksanakan proses penilaian barang milik daerah; Melaksanakan proses pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan proses pemusnahan barang milik daerah
 - e. Melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah;
 - f. Menyiapkan bahan dan data Tuntutan Ganti Rugi terkait barang milik daerah;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

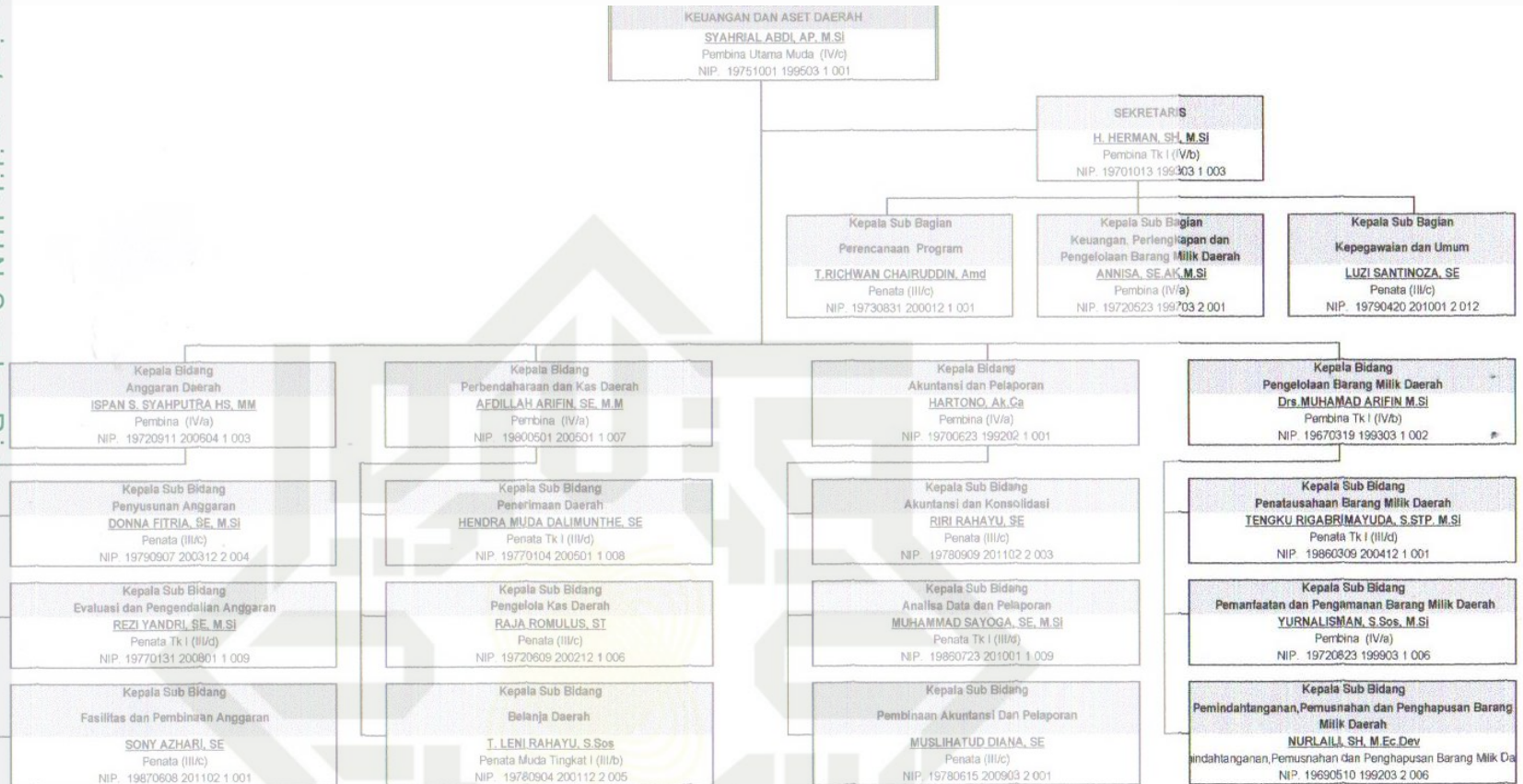


4.4 Bagan Struktur Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan



State Islamic University of North Sumatra



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemidahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola dan menggunakan barang sudah seperti sebagaimana mestinya.

Dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih kurangnya pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah yang ada. dalam penatausahaan untuk pelaporan masih belum tepat waktu itu juga dikarenakan kurangnya personil dalam menginventarisasi barang milik daerah yang ada. dan dalam penilaian juga Kantor Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah harus melatih pengurus barang untuk penilaian sehingga tidak lagi membutuhkan Konsultan dalam menilai barang milik daerah sehingga dengan demikian mampu mengurangi pengeluaran dan menghemat APBD yang ada.

6.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran-saran adapun saran yang harus penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap ada penambahan pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah yang ada sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan barang milik daerah.
2. Bagi kantor Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, pengelolaan aset yang maksimal merupakan nilai tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa menjadi bahan informasi bagi Kantor Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan seluruh pihak yang terkait.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku-buku

- Aswirullah, Haris Budiyo, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dharma, Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Dwiyanti. 1995. *Konsep Kinerja Organisasi Publik*. Jakarta: Jaya Abadi
- Hasibuan, Melayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kacung Marijan. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Muamar Alkadafi. 2018. *Administrasi pemerintahan daerah di Indonesia*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus
- Nitisemito, Alex S. 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan pengantar*, Jakarta: Ghali Indonesia
- Nurma. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Prajudi Atmosudijo. 2011. *Adminitrasi dan Managemen Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ryono, Sugeng. 2013. *Pemanfaatan aset Daerah*, Jurnal Administrasi Publik Desember, Vol.11, No.2, Hal.237
- Saman. 2011. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineka Citra
- Sugiyono. 2013 *Metedologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta
- Sulistiyani, Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Garaha ilmu
- T. Hani Handoko 2012 *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Vina Museliza. 2018. *Manajemen Logistik Sektor Publik*. Depok : Raja Grafindo Persada
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2010. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Pro HAW*. Jakarta:



PT Grafindo Persada

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi badan
Pengelolaan keuangan dan aset daerah

Referensi lainnya

http://barang_milik_Negara.Blogspot.com/2019/03_asas_umum_pengelolaan_barang_milik_Negara.html

http://id.Wikipedia.Org/wiki/Aset_Tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Normor
Sifat
Lampiran
Perihal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/7583/2019
: Biasa
: -
: Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Arif Kurnia Rahman
NIM : 11675102079
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Normor
Sifat
Lampiran
Perihal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/7583/2019
: Biasa
: -
: Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

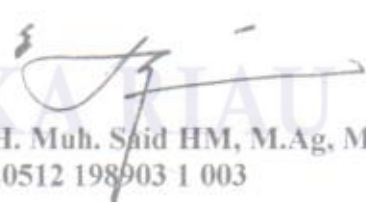
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Arif Kurnia Rahman
NIM : 11675102079
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fpx (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NOT IZIN-RISET/0
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



60400001

KEPADA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :
00.9/8/2020 Tanggal 5 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

ARIF KURNIA RAHMAN

11675102079

ADMINISTRASI NEGARA

SI

PEKANBARU

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

yang ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan

kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tanggal rekomendasi diterbitkan.

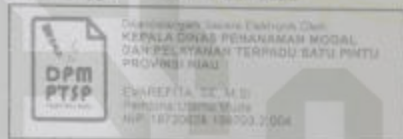
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

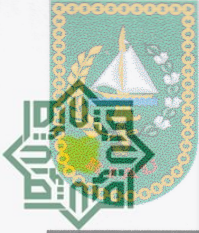
Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 20 Februari 2020



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/BPKAD-SEKR/ 394.2

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: LUZI SANTINOZA, SE
: 19790420 201001 2 012
: Penata (III/c)
: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Provinsi Riau

Bersama dengan surat ini menyatakan bahwa :

: ARIF KURNIA RAHMAN
: 11675102079
: Administrasi Negara
: Strata 1 (Satu)
: Pekanbaru
: Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
: Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi
Riau

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan riset di Badan Pengeloa Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

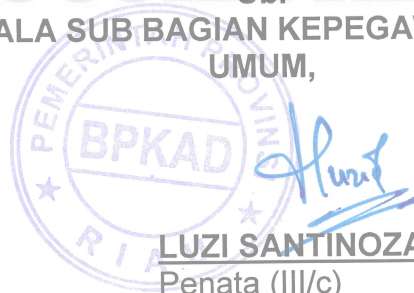
Pekanbaru, 06 April 2020

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DARAH PROVINSI RIAU,

SEKRETARIS,

Ub.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM,



LUZI SANTINOZA, SE

Penata (III/c)

NIP. 19790420 2041001 2 012

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap Penulis adalah Arif Kurnia Rahman ilahirkan disebuah desa yang terletak di Kabupaten Batang Pada Tanggal 08 Januari 1998 dari Ayah Sobirin dan Ibu Khotim Utami.

Riwayat pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Kecamatan Kepenuhan tamat Tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tsanawiyah Mifrtahul Ulum (MTS MU) Kecamatan Kepenuhan tamat pada Tahun 2013 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Madrasah Aliyah (MA HIFAL) Kota Pekalongan tamat pada Tahun 2016.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, telah menyelesaikan pendidikan S1 pada Tahun 2020.

UIN SUSKA RIAU